

IMPLEMENTASI OPERASI GABUNGAN PENGAMANAN WILAYAH UDARA DAN MARITIM NASIONAL DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NKRI (STUDI KASUS OPERASI GABUNGAN *EYES IN THE SKY* DI SELAT MALAKA & SINGAPURA)

Yulianto Nurcahyo, Martinus DAW, Bambang Kustiawan

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: walet0056@gmail.com, martindaw589@gmail.com, bkustiawan168@gmail.com

Abstrak

Operasi Eyes in the Sky (EIS) merupakan bentuk kerja sama pertahanan multinasional antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand yang bertujuan menjaga keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kawasan ini memiliki nilai strategis karena menjadi jalur pelayaran utama dunia yang rawan ancaman non-tradisional seperti perompakan, penyelundupan dan pelanggaran wilayah udara. Penelitian ini menganalisis implementasi operasi gabungan EIS sejak diluncurkan tahun 2005 hingga 2024 sebagai upaya pengamanan wilayah udara dan maritim nasional dalam menjaga kedaulatan NKRI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi lapangan. Analisis dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan, teori keamanan multidimensi serta konsep Maritime Domain Awareness (MDA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa EIS efektif menurunkan aktivitas ilegal di kawasan dan memperkuat kerja sama pertahanan regional. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan interoperabilitas sistem komunikasi lintas matra, perbedaan kebijakan antarnegara serta belum optimalnya sinergi pertahanan nasional dalam kerangka Whole of Government Approach. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan integrasi interoperabilitas sistem pertahanan dan sinergi kelembagaan nasional dalam konteks penguatan Maritime Domain Awareness kawasan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa EIS merupakan model kerja sama pertahanan yang efektif dalam memperkuat keamanan udara dan maritim nasional sekaligus mendukung diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan ASEAN.

Kata Kunci: Operasi Gabungan, Eyes in the Sky, Kedaulatan NKRI, Maritime Domain Awareness (MDA)

Abstract

Operation Eyes in the Sky (EIS) is a form of multinational defense cooperation between Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand aimed at maintaining security in the Straits of Malacca and Singapore. This region has strategic value because it is a major global shipping lane prone to non-traditional threats such as piracy, smuggling, and airspace violations. This study analyzes the

implementation of the joint EIS operation from its launch in 2005 to 2024 as an effort to secure national airspace and maritime in maintaining the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The study uses a qualitative method with a descriptive approach through interviews, documentation studies, and field observations. The analysis is conducted based on policy implementation theory, multidimensional security theory, and the concept of Maritime Domain Awareness (MDA). The results show that EIS is effective in reducing illegal activities in the region and strengthening regional defense cooperation. However, its effectiveness is still hampered by limited interoperability of cross-dimensional communication systems, differences in policies between countries, and suboptimal national defense synergy within the Whole of Government Approach framework. The contribution of this study lies in mapping the integration of defense system interoperability and national institutional synergy in the context of strengthening regional Maritime Domain Awareness. The conclusion of this study confirms that the EIS is an effective defense cooperation model in strengthening national air and maritime security while supporting Indonesia's defense diplomacy in the ASEAN region.

Keywords: *Joint Operations, Eyes in the Sky, Sovereignty of the Republic of Indonesia, Maritime Domain Awareness (MDA)*

PENDAHULUAN

Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan dua jalur pelayaran internasional yang memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Kedua kawasan ini menjadi salah satu titik tersibuk di dunia, dilalui lebih dari seratus ribu kapal setiap tahunnya yang mengangkut mineral, energi, produk industri dan komoditas penting lainnya. Kepadatan arus pelayaran tersebut menjadikan kedua selat rentan terhadap berbagai ancaman keamanan maritim, antara lain perompakan, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, aksi terorisme maritim, pelanggaran batas wilayah serta ancaman non-tradisional lainnya yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya aktivitas ilegal lintas negara. Kondisi ini menuntut negara-negara pesisir untuk memperkuat kerja sama pengamanan udara dan maritim melalui mekanisme yang terintegrasi, efektif, serta responsif terhadap dinamika ancaman yang terus berubah.

Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks keamanan kawasan tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar dan salah satu *coastal state* utama di Selat Malaka, Indonesia memikul tanggung jawab penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan memastikan kelancaran jalur logistik global. Namun demikian, ekspansi wilayah maritim yang luas, keterbatasan alat utama sistem senjata (alutsista), fragmentasi kewenangan antar instansi, serta belum optimalnya integrasi antar-matra menyebabkan upaya pengawasan laut tidak selalu berjalan efektif. Dalam konteks ini, penguatan pengawasan udara melalui mekanisme kerja sama internasional menjadi salah satu solusi strategis yang dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman maritim.

Implementasi Operasi Gabungan Pengamanan Wilayah Udara Dan Maritim Nasional Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI

Salah satu bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui operasi *Eyes in the Sky* (EIS) yang merupakan bagian dari *Malacca Strait Patrol* (MSP). Operasi ini dimulai pada tahun 2005 sebagai upaya kolaboratif antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan kemudian Thailand untuk meningkatkan *situational awareness* melalui patroli udara gabungan, pertukaran informasi taktis secara real-time dan koordinasi penanggulangan terhadap aktivitas mencurigakan di selat. Melalui EIS, awak pesawat gabungan dari beberapa negara bekerja sama dalam melaksanakan pengawasan lintas batas menggunakan pesawat pengintai yang dilengkapi perangkat komunikasi dan sensor udara. Sejak pelaksanaan awalnya, operasi ini telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka kejahatan maritim dan mempersempit ruang gerak pelaku kriminal di kawasan selat.

Meskipun demikian, perkembangan ancaman di era modern tidak lagi bersifat tunggal dan linear. Ancaman kini bersifat hibrida dan multidimensional. Penelitian yang dilakukan oleh Adam James Fenton (2024), yang menggunakan metode studi kasus terhadap ancaman siber-fisik di Selat Malaka, menunjukkan bahwa kawasan ini rentan terhadap serangan teknologi yang dapat melumpuhkan sistem transportasi dan navigasi global. Fenton menyoroti pentingnya integrasi *Maritime Domain Awareness* (MDA), teknologi sensor dan interoperabilitas lintas negara sebagai kunci mencegah serangan hibrida modern. Hasil penelitiannya mempertegas bahwa mekanisme seperti EIS harus berevolusi mengikuti dinamika ancaman mutakhir.

Penelitian lain oleh Yurizki Aliyah dan rekan-rekan (2024) tentang patroli trilateral INDOMALPHI di Laut Sulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa keberhasilan patroli multinasional sangat dipengaruhi oleh kerja sama regional, interoperabilitas militer, serta keselarasan SOP antarnegara. Kajian ini memberikan relevansi langsung bagi EIS karena menegaskan bahwa operasi gabungan hanya akan efektif ketika ada kesamaan persepsi ancaman dan integrasi komando yang kuat.

Selain itu, aspek geopolitik juga memainkan peran penting dalam memahami dinamika keamanan Selat Malaka. Annisha Sari (2023) melalui pendekatan geopolitik kritis menjelaskan bahwa kekuatan militer, faktor politik dan kepentingan ekonomi bersama menentukan stabilitas kawasan. Ia berpendapat bahwa keamanan Selat Malaka tidak hanya dapat dilihat dari sisi operasional militer semata, tetapi juga dari bagaimana negara-negara pesisir mendefinisikan ancaman dan mengelola interaksi politik mereka. Perspektif geopolitik ini sangat relevan untuk melihat bagaimana EIS menjadi instrumen strategis dalam membangun kepercayaan antarnegara.

Pada lingkup lebih luas, studi oleh Michael Shoebridge (2024) mengenai dinamika hubungan Australia dan China di Indo-Pasifik menggunakan analisis kebijakan pertahanan menemukan bahwa stabilitas kawasan bersifat rapuh dan sering kali berada dalam kondisi *unstable stability*. Walaupun tidak secara langsung meneliti EIS, penelitian tersebut memberikan konteks bahwa setiap mekanisme keamanan regional—termasuk EIS beroperasi dalam lingkungan yang dipengaruhi rivalitas kekuatan besar. Hal ini

mempertegas pentingnya memperkuat kapasitas nasional dan kerja sama regional untuk mempertahankan stabilitas kawasan.

Sementara itu, dalam penelitian berbasis survei kuantitatif, Jack R. Sato (2024) menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN masih memandang Amerika Serikat sebagai mitra latihan militer paling disukai, disusul oleh India dan China. Studi ini mengindikasikan bahwa dinamika kerja sama pertahanan di Asia Tenggara dipengaruhi oleh persepsi keamanan kolektif dan preferensi strategi pertahanan masing-masing negara. Temuan ini penting untuk memahami posisi EIS dalam peta kerja sama pertahanan kawasan yang semakin kompetitif.

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Luh Putu Ika Primayanti dan Saudi Firmansyah Putra (2020) melalui pendekatan kualitatif eksploratif menemukan bahwa kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman asimetris dibangun melalui tiga komponen utama, yaitu penguatan alutsista maritim, kerja sama pertahanan dengan negara tetangga dan peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga. Mereka menegaskan bahwa *Malacca Strait Patrol* termasuk EIS adalah representasi konkret strategi pertahanan maritim Indonesia untuk mengatasi perompakan, terorisme dan kejahatan lintas batas secara terkoordinasi. Studi ini memperkuat urgensi penelitian terhadap peningkatan interoperabilitas dan sinergi nasional dalam konteks EIS.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai keamanan maritim di kawasan Selat Malaka telah memberikan pemahaman yang cukup luas, mulai dari ancaman hibrida, kerja sama trilateral, dinamika geopolitik, preferensi kerja sama militer hingga strategi pertahanan nasional. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji interoperabilitas EIS, sinergi lintas matra dan antar instansi nasional Indonesia, serta peran EIS dalam menjaga kedaulatan wilayah udara dan maritim secara terpadu. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tiga aspek utama dalam implementasi Operasi EIS, yaitu interoperabilitas sistem dan prosedur operasi, sinergi antar instansi di Indonesia dalam mendukung pelaksanaan EIS dan kontribusi EIS terhadap penguatan pengamanan wilayah udara dan maritim nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan pertahanan Indonesia, khususnya dalam konteks operasi gabungan multinasional dan pengembangan sistem pengawasan udara-maritim yang terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Operasi *Eyes in the Sky* sebagai bagian dari kerja sama keamanan udara dan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, dinamika koordinasi, interaksi antar pemangku kepentingan, serta interpretasi para pelaksana operasi terhadap kebijakan dan implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan hasil kuantitatif, tetapi lebih kepada pemahaman komprehensif mengenai

Implementasi Operasi Gabungan Pengamanan Wilayah Udara Dan Maritim Nasional Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI

mekanisme operasional, tantangan, dan peluang peningkatan efektivitas EIS dari perspektif pertahanan negara.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di mana EIS dijadikan sebagai fenomena tunggal yang dikaji secara mendalam. Pemilihan metode studi kasus didasarkan pada pertimbangan bahwa operasi ini merupakan bentuk kerja sama multinasional yang kompleks, melibatkan berbagai instansi, dan memiliki konteks operasional yang spesifik. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi bagaimana koordinasi lintas negara dan lintas instansi berlangsung, bagaimana mekanisme pertukaran informasi diimplementasikan, serta bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan operasional.

Fokus Penelitian

Penelitian berfokus pada wilayah operasi EIS, yaitu Selat Malaka dan Selat Singapura. Unit analisis penelitian ini mencakup tiga aspek utama:

- 1) Interoperabilitas antarnegara peserta EIS dalam pelaksanaan patroli udara bersama.
- 2) Sinergi antarinstansi nasional Indonesia dalam mendukung pelaksanaan operasi.
- 3) Implementasi EIS sebagai operasi gabungan multinasional yang berpengaruh pada pertahanan udara dan maritim Indonesia.

Objek yang diamati tidak hanya mencakup kegiatan patroli udara, tetapi juga alur komunikasi, struktur komando, prosedur koordinasi, serta mekanisme pelaporan yang digunakan dalam operasi.

Subjek dan Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan peran, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam operasi EIS. Informan berasal dari berbagai instansi yang berhubungan dengan pengamanan udara dan maritim, antara lain:

- 1) TNI AU (Koopsud I, Skuadron Udara 2 dan 4) yang bertanggung jawab pada pengawasan udara.
- 2) TNI AL (Koarmada I dan Pusat Penerbangan TNI AL) yang terlibat dalam operasi maritim dan mendukung EIS melalui informasi laut.
- 3) Korps Polairud Baharkam Polri yang memiliki peran penegakan hukum di wilayah perairan.
- 4) Bakamla RI yang menjalankan fungsi koordinasi keamanan maritim.
- 5) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait dengan keselamatan pelayaran dan pemantauan *vessel traffic*.
- 6) Narasumber tambahan dari negara mitra seperti Malaysia dan Singapura, sesuai relevansi dan aksesibilitas.

Pemilihan informan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan perspektif komprehensif dari pelaksana, koordinator, dan pembuat kebijakan yang terkait langsung dengan operasi EIS.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.

Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman informan dalam pelaksanaan EIS. Pertanyaan wawancara mencakup aspek interoperabilitas, mekanisme komando dan kendali, tantangan teknis, mekanisme pertukaran informasi, serta efektivitas sinergi antar instansi.

Observasi Lapangan

Observasi dilakukan terhadap kegiatan operasional seperti briefing patroli udara, mekanisme koordinasi, atau simulasi EIS, baik yang dilakukan oleh TNI maupun instansi lainnya. Observasi bertujuan memahami langsung dinamika operasional dan alur kerja yang mungkin tidak sepenuhnya tergambar dari wawancara.

Studi Dokumen

Dokumen yang dianalisis meliputi dokumen kebijakan, SOP EIS, laporan operasi, data *air surveillance, after action review*, perjanjian kerja sama internasional, dan regulasi nasional terkait pertahanan udara dan maritim. Studi dokumen membantu memberikan konteks normatif dan administratif dari operasi yang dikaji.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama:

- 1) Kondensasi Data – Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen diringkas, dikategorikan, serta dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian.
- 2) Penyajian Data – Informasi yang telah dikondensasi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memberikan gambaran hubungan antarkonsep seperti alur komunikasi, struktur komando, atau mekanisme operasi.
- 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi – Kesimpulan sementara diperiksa kembali dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Tahap ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan kredibel dan tidak bias.

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan beberapa strategi triangulasi, antara lain:

Implementasi Operasi Gabungan Pengamanan Wilayah Udara Dan Maritim Nasional Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI

- 1) Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki latar belakang instansi berbeda.
- 2) Triangulasi Metode, dengan memadukan wawancara, observasi, dan studi dokumen.
- 3) Triangulasi Waktu, dengan mengumpulkan data pada beberapa periode berbeda untuk melihat konsistensi informasi.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dipahami untuk menempatkan temuan secara proporsional. Pertama, akses informasi terhadap dokumen operasi multinasional sangat terbatas karena bersifat rahasia atau hanya untuk kepentingan internal negara peserta. Kedua, wawancara dengan negara mitra bergantung pada izin dan mekanisme diplomatik yang tidak selalu dapat dipenuhi. Ketiga, kegiatan observasi lapangan sangat ditentukan oleh jadwal operasi, sehingga peneliti mungkin tidak dapat mengikuti seluruh bentuk kegiatan patroli udara EIS secara langsung. Meskipun demikian, data yang dikumpulkan tetap memadai untuk menggambarkan implementasi EIS secara komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan utama penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi serta telaah dokumen terkait pelaksanaan Operasi *Eyes in the Sky*. Seluruh temuan tersebut dianalisis dengan mengacu pada kerangka teori dan fokus penelitian, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika operasional EIS di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pembahasan dalam bab ini disusun untuk menjelaskan tiga aspek utama, yaitu interoperabilitas antarnegara dalam pelaksanaan EIS, sinergi lintas matra dan antar lembaga nasional, serta implementasi operasi gabungan EIS dalam mendukung pengamanan wilayah udara dan maritim Indonesia. Uraian berikut ini memaparkan hasil penelitian secara sistematis sesuai ketiga aspek tersebut.

Gambaran Umum Implementasi Operasi Eyes in the Sky (EIS)

Operasi *Eyes in the Sky* merupakan salah satu komponen utama dari *Malacca Strait Patrol*, sebuah mekanisme kerja sama keamanan regional yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk mengatasi ancaman maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Operasi ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan lintas negara, khususnya perompakan dan penyelundupan, yang pada saat itu mengancam stabilitas jalur pelayaran strategis tersebut. EIS dirancang untuk memperkuat pengawasan maritim melalui patroli udara gabungan dengan sistem pelaporan terkoordinasi dan pertukaran informasi taktis secara real time di antara negara-negara peserta.

Pelaksanaan EIS didukung oleh struktur operasi yang terorganisasi, meliputi pusat koordinasi darat yang bertugas menerima laporan hasil patroli serta mengoordinasikan

tindak lanjut dengan unsur maritim masing-masing negara. Pola patroli dilakukan secara terjadwal pada sektor udara yang telah ditetapkan, dengan melibatkan pesawat-pesawat militer dan awak multinasional yang berada dalam satu wahana. Kehadiran awak gabungan ini menjadi ciri khas operasi EIS, karena memungkinkan integrasi langsung antar petugas dari berbagai negara selama pelaksanaan misi, sekaligus memperkuat kepercayaan dan keselarasan prosedur dalam menangani insiden maritim.

Dari sisi teknologi, negara peserta EIS mengerahkan berbagai platform udara seperti pesawat intai maritim CN-235 MPA milik Indonesia, Beechcraft dan pesawat pengintai lain milik Malaysia serta Singapura. Masing-masing platform memiliki perbedaan karakteristik, terutama dalam sistem sensor, radar, serta perangkat komunikasi. Meskipun demikian, seluruh pesawat dioperasikan dengan prosedur standar yang sama, termasuk pola pelaporan, pengisian formulir pengamatan, dan mekanisme penyampaian informasi kepada pusat komando. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi dan meminimalkan kesalahan interpretasi selama operasi berlangsung.

Dalam implementasinya, EIS telah memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka kejahatan maritim di selat. Tren penurunan perampokan dan penyelundupan menunjukkan bahwa patroli udara memiliki efek deterensi yang kuat terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, EIS meningkatkan kecepatan respons terhadap insiden melalui pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat antara udara dan laut. Namun demikian, pelaksanaan operasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan kemampuan alutsista, keterbatasan sistem komunikasi taktis, serta hambatan cuaca yang memengaruhi efektivitas pengamatan udara.

Secara umum, gambaran implementasi EIS menunjukkan bahwa operasi ini merupakan instrumen penting bagi keamanan maritim kawasan, sekaligus menjadi bentuk nyata kerja sama pertahanan yang mengedepankan koordinasi, kepercayaan, dan interoperabilitas lintas negara. Uraian berikutnya akan mengkaji lebih dalam mengenai aspek interoperabilitas, sinergi lintas matra, dan implementasi operasi gabungan EIS sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini.

Interoperabilitas Operasi Eyes in the Sky (EIS)

Interoperabilitas merupakan elemen yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Operasi *Eyes in the Sky* (EIS), mengingat operasi ini melibatkan lebih dari satu negara dengan latar belakang doktrin, kemampuan alutsista, dan standar operasional yang berbeda. Dalam konteks EIS, interoperabilitas tidak hanya mencakup kemampuan teknis untuk saling terhubung melalui sistem komunikasi dan perangkat pengawasan, tetapi juga mencakup keselarasan prosedur operasi, mekanisme pelaporan, pola komando, hingga kemampuan awak multinasional untuk bekerja dalam satu wahana pesawat secara koordinatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek interoperabilitas menjadi salah satu titik krusial yang memengaruhi efektivitas patroli udara gabungan di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Salah satu aspek utama dalam interoperabilitas adalah kesesuaian sistem komunikasi antarnegara. Dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan frekuensi dan

Implementasi Operasi Gabungan Pengamanan Wilayah Udara Dan Maritim Nasional Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI

teknologi komunikasi yang digunakan oleh pesawat maupun pos komando masing-masing negara. Kondisi ini seringkali mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian informasi atau perlunya metode komunikasi alternatif yang kurang efisien. Beberapa informan yang diwawancara menyebutkan bahwa kendala komunikasi lintas negara menjadi salah satu faktor yang dapat memperlambat proses pelaporan temuan di udara, terutama ketika terjadi kondisi mendesak yang membutuhkan respons cepat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi bersama yang terintegrasi masih memerlukan penguatan untuk mengurangi kemungkinan *communication gap* selama operasi.

Dari sisi prosedur operasional, negara-negara peserta EIS telah menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* bersama sebagai pedoman pelaksanaan patroli. Namun, implementasinya di lapangan menunjukkan adanya perbedaan dalam pemahaman dan penerapan SOP tertentu, terutama yang berhubungan dengan mekanisme pelaporan, klasifikasi ancaman, serta tindakan awal terhadap aktivitas kapal mencurigakan. Perbedaan *rules of engagement* antarnegara juga turut menjadi faktor pembatas, karena masing-masing negara mengacu pada regulasi pertahanan dan hukum domestik yang tidak selalu seragam. Meskipun demikian, kesamaan SOP dasar telah membantu menjaga konsistensi pelaksanaan misi di udara.

Interoperabilitas juga terlihat dari kemampuan alutsista yang digunakan dalam EIS. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand mengoperasikan pesawat dengan karakteristik teknis berbeda, termasuk jarak tempuh, kapasitas sensor, radar pemantauan, serta kemampuan identifikasi target. Perbedaan ini memengaruhi jangkauan pengamatan dan kualitas data yang dihasilkan selama patroli. Beberapa pesawat memiliki kemampuan pemantauan yang lebih unggul dalam kondisi cuaca ekstrem, sementara yang lainnya memiliki keterbatasan tertentu dalam melakukan pengamatan jarak jauh. Ketidaksamaan kapasitas teknis ini berdampak pada sinkronisasi operasi, terutama ketika melakukan patroli pada sektor yang membutuhkan pengawasan intensif.

Interoperabilitas antar awak pesawat juga menjadi perhatian dalam temuan penelitian. Meskipun awak gabungan telah dibentuk dan dilatih bersama, latar belakang bahasa, budaya organisasi, dan prosedur teknis masing-masing negara memerlukan proses adaptasi. Informan menyatakan bahwa koordinasi antar awak dapat berjalan efektif ketika telah tercipta kesamaan persepsi terhadap ancaman dan prosedur pelaporan. Namun demikian, pada kondisi tertentu, perbedaan gaya komunikasi dan interpretasi situasi dapat memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan di udara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa interoperabilitas dalam EIS sudah berada pada tingkat fungsional, namun belum mencapai tingkat optimal. Operasi dapat berjalan efektif karena adanya SOP dasar yang disepakati bersama serta komitmen negara peserta untuk melaksanakan patroli secara terkoordinasi. Akan tetapi, keterbatasan dalam integrasi sistem komunikasi, perbedaan teknis alutsista, serta variasi prosedur operasional menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut agar interoperabilitas dapat mendukung pelaksanaan operasi secara lebih maksimal. Pembahasan lebih lanjut mengarah pada sinergi lintas matra dan antar lembaga nasional, yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi EIS di Indonesia.

Sinergi Lintas Matra dan Antar Lembaga Nasional

Pelaksanaan Operasi *Eyes in the Sky* (EIS) di Indonesia menuntut adanya sinergi yang kuat antara berbagai unsur pertahanan dan keamanan nasional. Mengingat operasi ini tidak hanya berada dalam ruang lingkup militer udara, tetapi juga berkaitan langsung dengan operasi laut dan penegakan hukum maritim, maka keterlibatan lintas matra serta koordinasi antar lembaga menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh dari patroli udara dapat ditindaklanjuti secara efektif di permukaan laut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi nasional dalam mendukung EIS telah terbentuk melalui pembagian peran yang jelas, namun dalam praktiknya masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar operasi berjalan lebih optimal.

TNI Angkatan Udara (TNI AU) berperan sebagai unsur utama dalam pelaksanaan misi udara melalui pengoperasian pesawat intai yang digunakan untuk patroli gabungan. Tugas TNI AU meliputi perencanaan jalur patroli, pengumpulan data pengamatan, serta penyampaian laporan kepada pusat kendali nasional. Sementara itu, TNI Angkatan Laut (TNI AL) berperan dalam menindaklanjuti temuan hasil pengamatan udara melalui penggerahan unsur kapal perang untuk melakukan identifikasi, intersepsi, atau penindakan terhadap kapal yang dicurigai. Peran ini sangat krusial mengingat banyak temuan di udara harus direspon secara cepat di permukaan laut demi mencegah pelaku kejahatan menghilang dari wilayah pengawasan.

Polri, melalui Korps Polairud, memiliki mandat dalam aspek penegakan hukum maritim, terutama terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah yurisdiksi nasional. Polairud turut berperan dalam menindaklanjuti informasi dari EIS apabila kasus yang ditemukan berkaitan dengan tindak kriminal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, atau pelanggaran hukum lain yang berada dalam ranah kepolisian. Di sisi lain, Bakamla RI berfungsi sebagai koordinator keamanan maritim nasional dan memiliki kapasitas dalam pengawasan laut, patroli keamanan, serta integrasi data maritim lintas institusi. Bakamla menjadi salah satu elemen penting yang menjembatani peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan maritim secara terkoordinasi.

Selain unsur militer dan penegak hukum, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, juga memainkan peran strategis dalam pengaturan lalu lintas pelayaran, monitoring *vessel traffic services (VTS)*, serta pengelolaan sistem navigasi yang mendukung efektivitas deteksi terhadap pergerakan kapal. Data teknis yang dimiliki Kemenhub turut menjadi rujukan penting dalam menganalisis pola pergerakan kapal mencurigakan yang terdeteksi oleh patroli udara.

Meskipun pembagian tugas tersebut telah berjalan cukup baik, koordinasi antar lembaga tidak selalu berlangsung secara mulus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan pada integrasi sistem informasi maritim nasional. Masing-masing instansi memiliki sistem pemantauan sendiri yang belum seluruhnya terhubung secara interoperable. Kondisi ini menyebabkan proses pertukaran data sering bergantung pada komunikasi manual melalui telepon atau pesan teks, sehingga memperlambat respon pada situasi yang membutuhkan penanganan cepat. Selain itu, perbedaan prioritas

Implementasi Operasi Gabungan Pengamanan Wilayah Udara Dan Maritim Nasional Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI

antarinstansi dan adanya sekat kewenangan juga menjadi tantangan dalam mewujudkan *unity of effort* yang solid.

Beberapa informan menegaskan bahwa tingkat efektivitas sinergi sangat dipengaruhi oleh pengalaman latihan bersama dan pembentukan forum koordinasi yang rutin. Latihan terpadu antara TNI AU, TNI AL, Polairud dan Bakamla dinilai mampu meningkatkan pemahaman bersama terhadap prosedur operasi, pola komunikasi, serta respons terhadap insiden. Namun, di lapangan, kesenjangan kemampuan teknologi, keterbatasan logistik, serta jumlah personel yang belum memadai turut menjadi faktor pembatas.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat sejumlah praktik baik dalam sinergi nasional, salah satunya kemampuan unsur laut TNI AL dan Polairud untuk bergerak cepat setelah menerima informasi valid dari udara. Koordinasi yang efektif terutama terlihat pada penanganan beberapa insiden penyelundupan dan pelanggaran batas, di mana informasi dari EIS berhasil ditindaklanjuti dengan kehadiran unsur laut dalam waktu relatif singkat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penguatan sistem komando dan kendali yang lebih terintegrasi, efektivitas operasi dapat ditingkatkan lebih jauh.

Sinergi nasional dalam mendukung EIS sudah berada pada tingkat yang memungkinkan operasi berjalan efektif, namun masih memerlukan peningkatan pada integrasi sistem informasi, harmonisasi SOP lintas instansi, serta penguatan pelatihan terpadu. Aspek-aspek ini menjadi kunci bagi peningkatan efektivitas EIS di masa depan, terutama ketika menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks dan multidimensi. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan bagaimana implementasi EIS sebagai operasi gabungan multinasional berkontribusi terhadap pengamanan wilayah udara dan maritim Indonesia.

Implementasi Operasi Gabungan Multinasional EIS

Pelaksanaan Operasi *Eyes in the Sky* sebagai bagian dari Malacca Strait Patrol merupakan wujud nyata dari kerja sama multinasional dalam menjaga keamanan udara dan maritim di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura. Implementasi operasi gabungan ini tidak hanya melibatkan integrasi kemampuan militer udara berbagai negara, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk membangun stabilitas keamanan regional melalui mekanisme yang terstruktur, terukur, dan berkesinambungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi EIS telah memberikan dampak signifikan bagi peningkatan keamanan maritim kawasan, khususnya dalam hal deteksi dini, respons cepat, serta peningkatan kepercayaan antarnegara.

Salah satu kontribusi utama EIS adalah meningkatnya efektivitas deteksi terhadap aktivitas kapal mencurigakan maupun pergerakan ilegal di perairan strategis. Penggunaan patroli udara gabungan memungkinkan cakupan wilayah pemantauan yang lebih luas dibandingkan patroli permukaan semata. Proses pengamatan yang dilakukan oleh awak multinasional dalam satu pesawat memastikan bahwa informasi yang diperoleh sejak awal dapat dipahami secara bersama dan dilaporkan dengan standar yang sama kepada

pusat komando masing-masing negara. Dengan adanya prosedur pelaporan terkoordinasi, setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti oleh unsur laut terdekat, baik dari Indonesia, Malaysia, Singapura, maupun Thailand. Hal ini memperpendek waktu respons dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam menindak pelaku kejahatan maritim.

Selain itu, implementasi EIS berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan. Melalui operasi ini, Indonesia menunjukkan komitmen aktifnya dalam menjaga stabilitas keamanan selat, sekaligus memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara tetangga. Kehadiran awak gabungan dari berbagai negara dalam satu wahana pesawat tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dan operasional, tetapi juga membangun saling pengertian dan kepercayaan di antara para personel militer. Interaksi ini menciptakan *confidence building measures* yang penting dalam menjaga hubungan baik di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.

Dalam konteks *Maritime Domain Awareness (MDA)* nasional, EIS menjadi salah satu sumber informasi strategis yang membantu Indonesia dalam membangun gambaran situasional laut secara lebih komprehensif. Informasi yang diperoleh dari patroli udara memberikan data penting tentang aktivitas kapal dalam jalur pelayaran, pola pergerakan mencurigakan, hingga potensi ancaman yang memerlukan tindak lanjut segera. Data ini kemudian dipadukan dengan informasi yang berasal dari radar pantai, sistem pelacakan kapal (AIS), dan pemantauan satelit untuk memperkuat sistem peringatan dini nasional. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi antara EIS dan sistem MDA nasional masih perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan gambaran situasional yang lebih akurat dan terhubung secara real-time.

Meskipun memberikan dampak positif, implementasi EIS juga menghadapi sejumlah tantangan operasional. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah perbedaan kepentingan strategis antarnegara yang dapat memengaruhi prioritas operasional dan respons terhadap temuan tertentu. Beberapa negara mungkin lebih fokus pada isu penyelundupan, sementara negara lain lebih menekankan pada pencegahan pelanggaran batas atau ancaman terorisme maritim. Perbedaan fokus ini terkadang menimbulkan variasi dalam tingkat tindak lanjut terhadap informasi yang sama.

Faktor teknis seperti kondisi cuaca ekstrem, batas kemampuan pesawat tertentu, serta ketersediaan dukungan logistik dapat memengaruhi kelancaran operasi. Cuaca buruk di kawasan selat, terutama pada musim tertentu, sering menjadi hambatan bagi pesawat untuk melakukan pengamatan secara optimal. Sementara itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga memengaruhi frekuensi dan durasi patroli yang dapat dilakukan oleh masing-masing negara.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan, pelaksanaan EIS mencerminkan adanya koordinasi lintas negara yang relatif berhasil, namun masih dipengaruhi oleh faktor komunikasi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Sementara itu, dari perspektif teori keamanan regional, keberadaan EIS berfungsi sebagai instrumen stabilitas yang mampu mereduksi ancaman dan meningkatkan kepercayaan antarnegara pesisir. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan sejumlah studi terdahulu yang menekankan bahwa

Implementasi Operasi Gabungan Pengamanan Wilayah Udara Dan Maritim Nasional Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI

operasi gabungan multinasional memiliki kontribusi signifikan terhadap keamanan kawasan, namun membutuhkan harmonisasi kebijakan dan teknologi untuk dapat berfungsi secara optimal.

Implementasi EIS telah memberikan manfaat yang besar bagi keamanan udara dan maritim Indonesia. Operasi ini tidak hanya memperkuat kemampuan deteksi dan respons, tetapi juga memperkokoh posisi Indonesia dalam kerja sama pertahanan kawasan. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada tingkat interoperabilitas, sinergi nasional, dan kemampuan negara-negara peserta untuk mengatasi berbagai tantangan operasional. Faktor-faktor ini akan menjadi dasar bagi evaluasi strategis terhadap keberlanjutan operasi EIS di masa yang akan datang serta penguatan kontribusi Indonesia dalam menghadapi dinamika ancaman di kawasan.

Tantangan Strategis dan Peluang Penguatan EIS

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Operasi *Eyes in the Sky* (EIS) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keamanan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh sejumlah tantangan strategis yang bersumber dari aspek teknis, kelembagaan, maupun geopolitik. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami secara komprehensif sebagai bagian dari evaluasi operasional, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi penguatan kerja sama keamanan udara dan maritim di masa mendatang.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan EIS adalah keterbatasan interoperabilitas sistem komunikasi antarnegara. Perbedaan platform komunikasi, teknologi radio, serta protokol keamanan informasi membuat proses pertukaran data tidak selalu berlangsung secara real-time. Pada beberapa situasi, awak pesawat harus menggunakan metode komunikasi alternatif yang lebih lambat untuk memastikan informasi dapat diterima oleh pusat komando negara lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi sistem komunikasi bersama masih perlu ditingkatkan agar seluruh data yang diperoleh dari patroli udara dapat segera ditindaklanjuti oleh unsur maritim di permukaan laut tanpa mengalami hambatan teknis.

Selain kendala komunikasi, perbedaan kemampuan alutsista udara antarnegara juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua pesawat yang digunakan dalam EIS memiliki standar sensor, radar, dan sistem navigasi yang sama. Ketidaksamaan ini memengaruhi kualitas pengamatan serta jarak deteksi yang dapat dicapai selama patroli. Pesawat dengan kemampuan sensor terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi visual dalam kondisi cuaca buruk atau ketinggian tertentu, sehingga informasi yang diperoleh membutuhkan verifikasi tambahan oleh negara lain. Ketidakseimbangan kemampuan teknis ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam efektivitas patroli multinasional.

Dari sisi kelembagaan, sinergi nasional yang mendukung pelaksanaan EIS juga menghadapi sejumlah hambatan. Masing-masing instansi memiliki mandat dan mekanisme kerja yang berbeda, sehingga integrasi antarlembaga tidak selalu berjalan mulus. Sistem informasi maritim nasional masih cenderung terfragmentasi, dan belum

seluruhnya terhubung dengan pusat komando EIS secara terintegrasi. Perbedaan prosedur tindak lanjut antara TNI AL, Polairud dan Bakamla juga berpengaruh pada kecepatan respons terhadap temuan patroli udara. Tantangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi SOP lintas instansi serta peningkatan efektivitas koordinasi antarmatakelola.

Faktor lain yang turut memengaruhi implementasi EIS adalah dinamika geopolitik kawasan. Selat Malaka merupakan wilayah strategis yang berada dalam lingkup kepentingan berbagai aktor regional maupun global. Persaingan pengaruh dan perubahan konstelasi politik kawasan dapat memengaruhi komitmen negara-negara peserta dalam mempertahankan intensitas patroli udara maupun berbagi informasi strategis. Perbedaan kepentingan nasional juga berpotensi memengaruhi prioritas operasional masing-masing negara, sehingga koordinasi dalam EIS perlu terus dijaga melalui jalur diplomasi pertahanan yang konsisten.

Di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk meningkatkan efektivitas EIS di masa depan. Salah satu peluang utama adalah perkembangan teknologi pengawasan dan komunikasi yang semakin maju. Integrasi sistem *Maritime Domain Awareness* (MDA) nasional dengan jaringan sensor lintas negara dapat memperkuat kemampuan deteksi dini dan pemetaan risiko di kawasan selat. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan dan penggunaan platform komunikasi terintegrasi berpotensi mempercepat alur informasi antarnegara dan antarinstansi nasional.

Peluang lainnya terletak pada penguatan latihan gabungan, baik dalam bentuk *table-top exercise* maupun latihan lapangan. Latihan seperti ini terbukti mampu meningkatkan kesamaan persepsi, memperkuat prosedur bersama, dan memperbaiki koordinasi antarawak pesawat multinasional. Penguatan kerja sama teknis antarnegara peserta EIS, seperti pertukaran teknologi sensor atau modernisasi platform udara, juga menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan standar kemampuan teknis operasi.

Selain itu, EIS memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat peran sebagai aktor penting dalam arsitektur keamanan kawasan. Melalui kontribusi aktif dalam patroli udara gabungan, Indonesia dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam berbagai forum pertahanan regional seperti ADMM dan ADMM-Plus. Keberhasilan EIS sebagai model kerja sama operasional dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan inisiatif keamanan lainnya, sekaligus memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di tingkat regional.

Kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan EIS menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas operasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Penguatan interoperabilitas teknis, integrasi kelembagaan nasional, pengembangan kapasitas SDM serta pemanfaatan teknologi pengawasan modern merupakan kunci untuk memastikan bahwa operasi EIS tetap relevan dan mampu menjawab dinamika ancaman yang terus berkembang. Peluang-peluang ini memberikan ruang bagi Indonesia dan negara-negara peserta lainnya untuk terus memperkokoh kerja sama multinasional dalam menjaga keamanan jalur pelayaran strategis di kawasan.

Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi Operasi *Eyes in the Sky* (EIS) merupakan model kerja sama multinasional yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan udara dan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. EIS mampu meningkatkan kualitas pengawasan udara melalui patroli gabungan, memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap ancaman, serta menyediakan mekanisme pertukaran informasi lintas negara secara cepat dan terkoordinasi. Namun, efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh tiga elemen kunci: interoperabilitas, sinergi nasional, dan mekanisme implementasi operasi gabungan.

Dari aspek interoperabilitas, penelitian menemukan bahwa negara-negara peserta telah berupaya menyalaraskan prosedur operasi dan standar pelaporan dalam EIS. Namun, perbedaan kemampuan alutsista, teknologi sensor, dan sistem komunikasi masih menjadi kendala utama yang menghambat kelancaran pertukaran informasi secara real-time. Meskipun demikian, komitmen untuk menerapkan SOP bersama serta kehadiran awak multinasional dalam satu wahana pesawat telah membantu meningkatkan pemahaman bersama terhadap mekanisme operasi, sehingga interoperabilitas dapat berjalan pada tingkat fungsional meskipun belum optimal.

Pada aspek sinergi lintas matra dan antar lembaga nasional, penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran antara TNI AU, TNI AL, Polairud, Bakamla RI, dan Kementerian Perhubungan telah berjalan dengan baik sebagai dasar bagi pelaksanaan EIS di Indonesia. Informasi patroli udara yang diperoleh melalui EIS mampu ditindaklanjuti oleh unsur laut dengan cukup efektif, terutama pada kasus-kasus yang membutuhkan respons cepat. Namun demikian, perbedaan sistem informasi maritim, dinamika komando, serta koordinasi antarlembaga masih perlu ditingkatkan untuk memastikan *unity of effort* yang lebih solid dalam pelaksanaan operasi gabungan.

Sementara itu, implementasi EIS sebagai operasi gabungan multinasional menunjukkan bahwa operasi ini tidak hanya memberikan manfaat operasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia. Pelaksanaan patroli udara bersama dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik antarnegara, menciptakan mekanisme keamanan kolektif, serta memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur pertahanan regional. EIS juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas *Maritime Domain Awareness* nasional melalui ketersediaan informasi strategis yang dapat mendukung sistem peringatan dini.

Ketiga aspek utama tersebut saling terkait dan saling memengaruhi. Interoperabilitas menjadi fondasi bagi terciptanya sinergi nasional yang efektif, sementara sinergi nasional menjadi prasyarat utama agar implementasi operasi gabungan dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya, implementasi operasi gabungan yang baik akan memperkaya pengalaman operasional dan memperkuat justifikasi untuk meningkatkan interoperabilitas maupun sinergi nasional. Dengan demikian, keberhasilan EIS tidak dapat dipisahkan dari kemampuan negara-negara peserta dan instansi nasional untuk terus memperbaiki ketiga aspek tersebut secara simultan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa EIS beroperasi dalam konteks geopolitik kawasan yang dinamis. Tantangan keamanan modern, seperti ancaman siber-fisik, aktivitas kejahatan lintas negara, hingga ketegangan geopolitik antarnegara besar, membuat operasi seperti EIS memiliki relevansi strategis yang semakin tinggi. Namun di sisi lain, dinamika tersebut juga menuntut peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan operasi dalam jangka panjang.

Sintesis hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun EIS telah berjalan efektif dan memberikan manfaat strategis, masih terdapat ruang untuk perbaikan yang sangat substansial, baik pada sisi interoperabilitas teknologi, integrasi kelembagaan nasional, maupun tata kelola koordinasi multinasional. Penguatan pada ketiga aspek ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa EIS tetap mampu menjawab dinamika ancaman yang semakin kompleks serta memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama keamanan kawasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Operasi *Eyes in the Sky* merupakan bentuk kerja sama multinasional yang efektif dalam meningkatkan keamanan udara dan maritim di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura. Implementasi operasi ini berkontribusi pada peningkatan kemampuan deteksi dini, penurunan tren kejahatan maritim, serta penguatan mekanisme pertukaran informasi taktis antarnegara. Namun demikian, efektivitas operasi ini sangat ditentukan oleh tiga aspek utama yang menjadi fokus penelitian ini.

Pertama, dari aspek interoperabilitas, negara-negara peserta EIS telah memiliki prosedur operasi standar yang disepakati bersama dan melaksanakan patroli udara gabungan secara terkoordinasi. Namun, perbedaan teknologi komunikasi, kapasitas sensor pesawat, standar prosedur, dan *rules of engagement* masih menjadi kendala yang membatasi kelancaran integrasi operasional. Interoperabilitas teknis dan prosedural ini berada pada tingkat fungsional, tetapi belum sepenuhnya optimal untuk mendukung operasi yang membutuhkan pertukaran data real-time secara konsisten.

Kedua, pada aspek sinergi lintas matra dan antar lembaga nasional, keterlibatan TNI AU, TNI AL, Polairud, Bakamla RI, dan Kementerian Perhubungan telah membentuk kerangka koordinasi yang mendukung pelaksanaan EIS di Indonesia. Namun, integrasi sistem informasi maritim nasional yang masih terfragmentasi serta perbedaan SOP dan alur komando antarinstansi menyebabkan proses tindak lanjut informasi tidak selalu berjalan dengan kecepatan dan konsistensi yang dibutuhkan. Meskipun begitu, sejumlah praktik baik di lapangan menunjukkan bahwa sinergi dapat berjalan efektif apabila didukung latihan gabungan dan mekanisme komunikasi yang jelas.

Ketiga, aspek implementasi operasi gabungan multinasional menunjukkan bahwa EIS tidak hanya memberikan manfaat operasional, tetapi juga strategis. Operasi ini memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia, meningkatkan kerja sama antarnegara, serta mendukung pembangunan stabilitas kawasan. EIS berperan dalam memperkaya

Implementasi Operasi Gabungan Pengamanan Wilayah Udara Dan Maritim Nasional Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI

sistem *Maritime Domain Awareness* nasional dengan menyediakan data pengamatan strategis dari udara. Namun, dinamika geopolitik kawasan, perbedaan kepentingan negara peserta, serta keterbatasan logistik masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan operasi ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa EIS merupakan instrumen strategis dalam menjaga keamanan maritim dan udara regional. Meskipun memiliki sejumlah keterbatasan, operasi ini tetap menjadi fondasi penting dalam kerja sama keamanan kawasan dan berpotensi ditingkatkan melalui penguatan interoperabilitas, sinergi nasional, dan kapabilitas operasional negara peserta.

BIBLIOGRAFI

- Aliyah, Y., Ramadhani, R., & Nasution, Z. (2024). *Strategy for securing Indonesia's border sea area in the Sulu Sea through trilateral maritime patrol Indomalphi*. Journal of Social Science and Education Research Studies, 4(3).
- Arifin, M. (2021). *Implementasi Maritime Domain Awareness (MDA) dalam meningkatkan keamanan maritim Indonesia*. Jurnal Keamanan Nasional, 7(2), 112–130.
- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post–Cold War Era*. University of North Carolina Press.
- Fenton, A. J. (2024). *Preventing catastrophic cyber–physical attacks on the global maritime transportation system: A case study of hybrid maritime security in the Straits of Malacca and Singapore*. Journal of Marine Science and Engineering, 12(3).
- International Maritime Bureau. (2010). *Piracy and armed robbery report*. ICC International Maritime Bureau.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and Interdependence*. Longman.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton.
- Primayanti, L. P. I., & Putra, S. F. (2020). *Seapower and asymmetric warfare in Indonesia*. Jurnal Pertahanan, 6(1), 32–51.
- ReCAAP Information Sharing Centre. (2019). *Annual Report on Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia*. Singapore: ReCAAP ISC.
- Sari, A. (2023). *Critical geopolitics in strengthening security and defense in the Strait of Malacca*. Journal of Progressive Sciences and Technologies, 33(2), 55–64.
- Sato, J. R. (2024). *Southeast Asia's preferred military exercise partner*. Asia Defence Review, 18(1), 21–35.
- Shoebridge, M. (2024). *Australian encounters with the PLA in 2022–23: An unstable stability*. Australian Strategic Policy Institute Report.
- Tsamenyi, M., & Palma, M. (2012). *The role of multinational maritime patrols in securing the Malacca Strait*. Maritime Affairs, 8(1), 45–61.
- UNCLOS. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. United Nations.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. Administration & Society, 6(4), 445–488.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1977). *Policy implementation as a process*. Sage Publications.

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

